

Militer dan Politik Masa Orde Baru: Kajian Historiografi Buku Karya Harold Crouch “Militer dan Politik di Indonesia”

Ibnu Hafiz Maulana^{1*}, Etni Hardi²

^{1,2} Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*ibnuhafizdoonk@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to discuss Military and Politics in Indonesia in a book by Harold Crouch which has become a classic reference in the study of civil-military relations in Indonesia, especially during the New Order period. This study aims to conduct a critical historiographic study of Crouch's book with a focus on the New Order period. This study uses a historiography approach by critically analyzing Crouch's book in the context of the development of Indonesian history studies. The methods used include text analysis, literature review: Conduct a study of relevant literature to understand the development of discourse on civil-military relations in Indonesia. The results of the study show that Crouch's book made a significant contribution in understanding the role of the military in Indonesian politics during the New Order period. However, there are some limitations in Crouch's analysis, such as focusing too strongly on the role of the military, Crouch tends to prioritize the role of the military in explaining political dynamics, thus ignoring other factors that are also important. Using the concept of the dual function of the ABRI that is too narrow, Crouch tends to see the dual function of the ABRI as the main cause of military dominance in politics without considering the complexity and multidimensionality of this concept. Lacking attention to the perspectives of non-military actors, Crouch pays less attention to the perspectives of civilian actors and community groups in explaining political dynamics.

Keyword : Harold Crouch, Military History, New Order

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Militer dan Politik di Indonesia dalam buku karya Harold Crouch yang menjadi rujukan klasik dalam studi hubungan sipil-militer di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian historiografi kritis terhadap buku Crouch dengan fokus pada periode Orde Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan historiografi dengan menganalisis secara kritis buku Crouch dalam konteks perkembangan studi sejarah Indonesia. Metode yang digunakan meliputi analisis teks, kajian literatur: Melakukan kajian terhadap literatur yang relevan untuk memahami perkembangan diskursus mengenai hubungan sipil-militer di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku Crouch memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran militer dalam politik Indonesia pada masa Orde Baru. Namun, terdapat beberapa keterbatasan dalam analisis Crouch, seperti fokus yang terlalu kuat pada peran militer, Crouch cenderung mengutamakan peran militer dalam menjelaskan dinamika politik, sehingga mengabaikan faktor-faktor lain yang juga penting. Penggunaan konsep dwifungsi ABRI yang terlalu sempit, Crouch cenderung melihat dwifungsi ABRI sebagai penyebab utama dominasi militer dalam politik tanpa mempertimbangkan kompleksitas dan multidimensi konsep ini. Kurangnya perhatian terhadap perspektif aktor non-militer, Crouch kurang memberikan perhatian pada perspektif aktor sipil dan kelompok masyarakat dalam menjelaskan dinamika politik.

Kata Kunci : Harold Crouch, Sejarah Militer, Orde Baru

PENDAHULUAN

Rezim Orde Baru dapat dikatakan sebagai era kemenangan militer karena peranannya menjadi sangat besar. ABRI (yang kemudian berubah menjadi TNI) mengintervensi politik sipil melalui doktrin dwifungsi. Dengan doktrin ini, militer memperoleh legitimasi untuk

masuk ke ranah politik sipil, antara lain dengan menempatkan tenaga militer yang aktif ataupun pensiunan di MPR, DPR, DPRD, eksekutif, dan staf pemerintah pusat ataupun daerah. Sejumlah lembaga negara penting, seperti Depdagri selalu dipegang ABRI. Pada tahun 1996 seperempat jabatan setingkat kabinet, termasuk Menteri Agama dan jumlah besar eselon II dipegang oleh perwira yang masih dinas atau sudah pensiun. ABRI juga melakukan kontrol terhadap Golkar, mengawasi penduduk melalui komando teritorial (Emmerson, 2001, pp. 73–78). Cikal bakal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sendiri lahir pada 22 Agustus 1945, ketika PPKI mengumumkan terbentuknya sebuah Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang secara keorganisasian mencakup sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Tekat laskar rakyat untuk menolak Belanda menginjak kakinya di Indonesia telah menyadarkan pimpinan sipil untuk membentuk tentara nasional. Demikian pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR diubah menjadi TKR. Tahap ini masih berfungsi sebagai penjaga keamanan dalam negeri bukan menghadapi musuh dari luar. Statusnya ditingkatkan lagi dari badan menjadi tentara (Crouch, 1999, p. 24).

Tentara Nasional Indonesia pada masa Orde Baru sering disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI terdiri dari unsur angkatan perang dan Polri. Sebelumnya, masih menjadi perdebatan kapan militer mulai masuk ke dunia politik karena mengingat mereka lahir dari revolusi kemerdekaan sehingga ada anggapan bahwa mereka sudah berpolitik sejak awal. Kekuatan militer dalam dunia politik di Indonesia, mempunyai akar sejarah yang panjang dan tidak bisa dihapus begitu saja, bahkan akan menjadi sesuatu yang musykil. Pada era reformasi, saat partai-partai politik bermunculan, ternyata partai-partai politik mengundang militer masuk di dalamnya. Dianggapnya partai politik akan menjadi kuat bila ada militernya, apalagi yang sudah berpangkat jenderal. Akibatnya, hampir tidak ada satu partai pun yang di dalamnya tidak ada militernya (Anwar, 2018).

Dari peristiwa tersebut, sejarawan menjadi orang yang berperan penting dalam penulisan peristiwa-peristiwa masa silam melalui berbagai fakta yang ada. Tanpa melihat fakta-fakta sejarah, seorang sejarawan tidak mungkin dapat merekonstruksi sejarah yang telah terjadi. Fakta inilah yang memungkinkan seorang sejarawan mengungkapkan sejarah. Menurut Harold Crouch, sejak lahirnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) memang telah menempatkan dirinya sebagai kekuatan militer maupun politik. Di mana dalam sebagian sejarahnya ABRI telah memainkan peran politik yang penting. Selama beberapa tahun setelah kemerdekaan, ABRI menganggap dirinya sebagai pelindung. Di kemudian hari lebih menegaskan haknya untuk berperan secara tetap dalam kehidupan politik. Pemahaman ABRI tentang dirinya sebagai kekuatan non politik tidak berlangsung lama, dan segera ditarik kembali ke arena politik, bukan terutama karena ambisi politik para perwira mereka, atau karena pandangan dangkal para politisi (sipil), tetapi semata-mata karena keadaan politik yang memang telah runyam, dan telah menghasilkan suatu struktur kekuasaan yang tidak menentu, sehingga tidak mungkin membiarkan tentara/ABRI memencilkan diri dari kancah kehidupan politik (Crouch, 1999, p. 24).

Harold Crouch adalah seorang ilmuwan dan akademisi politik Australia yang fokus

pada studi politik Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Meskipun ia mungkin tidak dikenal secara luas sebagai tokoh sejarah, ia dikenal karena kontribusinya dalam memahami perkembangan politik di wilayah Indonesia. Harold Crouch telah dikaitkan dengan institusi akademis dan pusat penelitian, di mana dia telah melakukan penelitian ekstensif mengenai dinamika politik, konflik, dan pemerintahan di Indonesia. Karyanya sering kali melibatkan analisis struktur politik, dinamika kekuasaan, dan dampak perubahan politik terhadap negara. Sementara itu, selama periode 1966 hingga 1998 di Indonesia, yang mencakup era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Suharto, terdapat sejarawan Indonesia yang menulis tentang masalah militer dan politik. Penting untuk dicatat bahwa selama periode ini, terdapat pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, dan beberapa pakar menghadapi tantangan ketika mengungkapkan pandangan berbeda (Crouch, 1999, p. 24).

Juwono Sudarsono, yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 1998-1999, menginisiasi penulisan sejarah versi baru yang artinya Nugroho tak lagi jadi rujukan. Selain itu muncul desakan masyarakat agar buku sejarah versi pemerintah yang baru turut menyertakan kronologi tumbangnya Rezim Soeharto. Karya ilmiah sejarah harus dilandasi data/fakta peristiwa sejarah yang melatarbelakanginya. Kesan-kesan (bekas-bekas) merupakan fakta-fakta yang dapat ditangkap manusia, dan sejumlah fakta yang tersusun rapi dengan tafsiran tertentu adalah cerita sejarah. Sistem tafsiran atau hubungan antar fakta tergantung dari kepribadian pembuat cerita (Ali, 2005, pp. 257–259). Tanpa mengabaikan keterlibatan dan peran kalangan ilmuwan atau para akademisi, sesungguhnya ada dua pihak yang menonjol perannya dalam pengalaman merupakan sumber pengetahuan yang banyak digunakan, pengalaman sebagai sumber pengetahuan memiliki keterbatasan, antara lain pengalaman tergantung orang (subyek) yang mengalami, setiap orang berbeda, maka bersifat subyektif serta tidak semua hal dapat dialami (Ysh, 2016, p. 4).

Pada awal reformasi, banyak upaya untuk menulis ulang sejarah. Masing-masing mempunyai visi tersendiri mengenai apa yang harus ditekankan dan apa yang harus dihilangkan. Masa pasca Orde Baru dengan desentralisasi sebagai poros utamanya, membuka peluang bagi beragam kelompok yang mewakili pihak-pihak yang dibungkam pada masa lalu untuk menyelidiki berbagai sejarah didalam historiografi yang sudah dipisahkan dari pusat (Henk Schulte Nordholt, 2008, p 3). Tulisan mengenai peran politik militer terus berkembang sesuai zamannya, bahkan militer pada masa Orde Baru berdampak pada subordinasi seluruh kepentingan dan aspirasi rakyat pada negara yang sudah diidentifikasi dengan kekuasaan militer. Dalam konsep ini sulit dibedakan mana militer yang merupakan bagian dari negara dengan militer yang dikuasai negara. Kosepsi kenegaraan seperti itu akan membenarkan militer untuk berperan atas nama negara dan rakyat sekaligus (Nordholt, 2008, p. 3).

Meski sudah banyak penelitian dan publikasi terkait peranan militer pada masa orde baru, namun ternyata masih menyisakan ruang untuk penelitian baru. Berbagai penelitian peranan militer baik ditulis oleh ahli sejarawan maupun amatir pada umumnya hanya memusatkan pada dimensi konflik berkisar pada persoalan peristiwa-peristiwa yang melibatkan tragedi kemanusiaan, yang dalam hal ini dimensi kemanusiaan hak azasi manusia. Adapun dimensi lain, seperti persoalan politik, sosial, maupun ekonomi jarang disentuh.

Sementara itu, pada masa Orde Baru bukan hanya ada peristiwa-peristiwa tragedi kemanusiaan, akan tetapi militer mempunyai peranan dan fungsi yang menyimpan sumber kisah yang luas. Harold Crouch adalah pengamat militer-politik Indonesia dari Australia, Crouch pertama kali tiba di Indonesia tahun 1968. Pada saat itu, militer telah mengambil alih kekuasaan, dan Soeharto dilantik sebagai presiden. Saat mengajar di Universitas Indonesia, Crouch bertemu dengan banyak tokoh politik dan militer. Dia mulai tertarik untuk menulis tentang peran politik para jenderal di Indonesia.

Dalam penelitiannya, Crouch mengatakan bahwa militer tidak pernah membatasi dirinya hanya sebagai kekuatan militer semata. Buku yang dipilah dalam 13 bab itu membelegiti peran militer, tentu saja yang dimaksud angkatan darat/ABRI, dalam politik sejak kemerdekaan lengkap dengan koneksi bisnisnya. Kala itu adalah hal terlarang membicarakan militer dalam gurita bisnis di Indonesia. Tulisannya bercirikan penelitian, analisis, dan perspektif akademis yang cermat mengenai perkembangan politik, institusi, dan pemerintahan di Indonesia. Karya-karya ilmuwan politik seperti Crouch berkontribusi pada pemahaman akademis tentang dinamika politik negara-negara yang mereka pelajari. Buku-buku ini sering digunakan sebagai sumber akademis dan referensi oleh mahasiswa, peneliti, dan cendekiawan yang tertarik dengan politik Indonesia.

Kajian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana karya Harold Crouch, yang sempat dilarang di masa Orde Baru, justru menjadi perubahan penting dalam pemahaman kita tentang dinamika militer-politik di Indonesia. Analisis historiografi ini akan mengungkap bagaimana tulisan Crouch tidak hanya mendokumentasikan masa lalu, tetapi juga merangsang perdebatan intelektual yang berkelanjutan hingga kini. Melalui analisis ini, penelitian ini akan mengungkap bagaimana karya Crouch, yang sempat dilarang namun kemudian tersebar luas, menjadi sumber pengetahuan yang penting bagi generasi berikutnya untuk memahami kompleksitas hubungan antara militer dan politik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas bagaimana karya Crouch telah mempengaruhi perkembangan studi tentang militer dan politik di Indonesia.

METODE

Metode sejarah digunakan dalam melakukan penelitian ini. Menurut Louis Gotschalk metode penelitian ilmu sejarah terdiri dari empat tahap. Diantaranya ialah heuristik, kritik, interpretasi dan histografi atau penulisan sejarah (Gottschalk, 2008, p. 16). Pada penelitian histografi ini termasuk penelitian kepustakaan, merupakan penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa melakukan riset lapangan (Zed, 2004, p. 3). Adapun tahapan penelitian yang dilakukan penulis yaitu studi kepustakaan untuk mencari dan mengumpulkan sumber. Tahap ini penulis mencari dan menemukan sumber mengenai historiografi maupun mengenai literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini, latar belakang penulis karya dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Sumber dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini ialah Buku Militer dan Politik di Indonesia Karya Harold Crouch, sedangkan sumber sekunder dengan mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan militer dan politik pada masa pemerintahan orde baru ataupun pendapat penulis lain terkait Harold Crouch. Bahan sumber juga ditemukan dalam bentuk jurnal, artikel, skripsi,

ataupun tesis. Selain itu turut mengumpulkan bahan terkait kajian-kajian historiografi. Kemudian kritik sumber dimaksudkan untuk menyeleksi data yang sudah terkumpul dan memilah data yang sesuai dengan penelitian. Hal ini bertujuan agar mengetahui data apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan penelitian. Setelah kritik, selanjutnya adalah melakukan interpretasi. Interpretasi atau penafsiran sejarah sering kali disebut juga dengan analisis sejarah. Terakhir tahapan historiografi yang merupakan puncak dari penelitian. Penulisan tahap ini fungsinya adalah menyampaikan informasi kepada khalayak dalam mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang serta metode objek kajian terhadap perumusan yang diajukan.

PEMBAHASAN

Militer dan Politik Pada Masa Orde Baru

Masa Orde Baru dimulai setelah Presiden Soekarno dilengserkan pada tahun 1965. Kondisi politik yang arahnya belum jelas akibat kudeta, mendorong Soeharto membangun apa yang dikenal dengan “Orde Baru” untuk membedakan dengan masa pemerintahan Soekarno yang disebut “Orde Lama”. Orde Baru didukung oleh kelompok-kelompok yang ingin terbebas dari masa lalu. Pada periode 1965-1975, Orde Baru mendapat beragam pendapat dari para pengamat politik. Sayap kanan memuji pemerintahan Soeharto karena berhasil menumpas PKI dan membuat kebijakan yang condong ke Barat. Di sisi lain, sayap kiri mencemooh kedua kebijakan tersebut. Banyak pula pengamat yang memuji sekaligus mencemooh karena keberhasilan Soeharto dalam menyeimbangkan ekonomi tetapi buruk dalam mengatasi pelanggaran HAM dan korupsi (Ricklefs, 2008, p. 558). Hal unggul yang dimiliki pemerintahan Orde Baru adalah kemampuannya menciptakan stabilitas politik dengan pemerintahan yang solid, yang membantu membangun dasar untuk kemajuan di sektor lain, terutama dengan masuknya investasi asing yang mendorong tumbuhnya ekonomi makro secara pesat. Dalam pemerintahan Orde Baru, kondisi politik yang stabil dianggap penting untuk memudahkan rencana pembangunan ekonomi, sehingga restrukturisasi politik menjadi elemen kunci dalam membangun sistem politik berbasis sentralisme, dengan harapan pembangunan ekonomi dapat berjalan cepat. Namun, bentuk pemerintahan yang sentralistik ini pada akhirnya menghasilkan kekuasaan politik otoriter selama 32 tahun, hingga akhirnya kekuasaan Soeharto runtuh akibat gerakan mahasiswa dan elemen sipil lainnya pada tahun (Ricklefs, 2008, p. 560).

Pada awal 1970-an, kekerasan menjadi instrumen utama yang digunakan pemerintah Orde Baru untuk mencapai politik yang stabil sebagai upaya membangun konsolidasi politik. Kegiatan politik dari periode sebelumnya dibungkam, dan kekuatan oposisi dibatasi. Dalam hal ini, dibentuklah beberapa badan intelijen guna mengawasi masyarakat, seperti BAIS (Badan Intelijen Strategis) yang terdiri dari unsur militer, BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen) yang lebih banyak diisi oleh sipil, serta lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Sandi Negara dan Jaksa Agung Muda bidang intelijen. Pada pemerintahan tingkat desa, pengawasan dilakukan oleh BAIS, Ditjensospol (Direktorat Jenderal Sosial Politik), dan Kopkamtib (Komando Keamanan dan Ketertiban), yang kemudian berubah menjadi Bakorstranas (Badan Koordinasi Strategis Nasional). Upaya lain untuk mencapai stabilitas politik yaitu dengan mengendalikan birokrasi sipil dan militer. Seperti dijelaskan oleh Donald K. Emmerson dalam bukunya “The Bureaucracy in Political Context: Weakness in Strength”, pada masa Orde Baru militer mendominasi berbagai sektor kehidupan politik dan ekonomi. Militer menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk mengendalikan berbagai institusi negara dan membungkam kritik serta oposisi. Misalnya dalam birokrasi sipil pada masa Orde Baru, langkah awal yang diambil pemerintah adalah membersihkan unsur-unsur yang dianggap berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pemerintahan Soekarno. Rekrutmen pejabat baru dibatasi dan

dilakukan di bawah pengawasan ketat, sementara batas usia pensiun dipercepat untuk mempercepat pergantian pegawai. Birokrat yang memiliki keterkaitan dengan partai politik digantikan oleh pegawai sipil yang tidak terlibat dalam partai. Struktur birokrasi kemudian dibentuk agar hanya setia kepada pemimpin eksekutif, dengan menerapkan pola organisasi yang menyerupai gaya militer, yaitu hierarkis dan dilengkapi dengan pakaian dinas serta atribut seragam yang menekankan kedisiplinan dan kepatuhan (Yusa' Farchan, 2022, p. 153).

Afan Gaffar berpendapat bahwa penguasaan birokrasi pada masa Orde Baru diwujudkan dalam tiga pola utama. Pertama, dalam setiap pemilu, birokrasi secara langsung memberikan dukungan kepada Golkar. Contohnya, pada Pemilu 1997, kurang lebih 1,1 juta pegawai negeri sipil (PNS) menjadikan Golkar sebagai pilihan politiknya. Jika digabung dengan suara keluarga mereka, Golkar meraih sekitar 10 juta suara dari kalangan PNS beserta keluarganya. Dengan perkiraan satu kursi di DPR bernilai 400.000 suara, suara dari PNS ini menyumbangkan sekitar 20 kursi bagi Golkar. Pada Pemilu 1997, Golkar berhasil mengisi 325 dari 425 kursi DPR RI atau sekitar 76,47% kursi yang diperebutkan. Kedua, birokrasi menguasai seluruh struktur panitia pemilu untuk memastikan kemenangan Golkar. Mulai dari Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Tingkat I dan II, hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), semuanya dikuasai oleh kalangan birokrasi. Ketiga, disetiap pemilu, birokrasi juga bertindak sebagai donatur bagi kemenangan Golkar melalui kontribusi dari pegawai pemerintahan (Gaffar, 1999, pp. 235–237).

Sambil membenahi birokrasi, Orde Baru juga berusaha mengendalikan konflik dalam militer, terutama di Angkatan Darat (AD). Fokus utamanya adalah pada para perwira yang tidak senang dengan cepatnya Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, sementara mereka masih memegang posisi penting di militer. Meskipun mereka menerima kepemimpinan Soeharto dan tidak ingin terjadi perang saudara, mereka tetap bersiap untuk memanfaatkan kelemahan Soeharto jika ada kesempatan. Menurut Harold Crouch, untuk mengatasi masalah tersebut, Soeharto menerapkan dua cara. Pertama, Soeharto tetap menggunakan pasukan yang sebelumnya terlibat dalam pembersihan setelah kudeta, dan mengarahkan mereka untuk menghadapi sisa-sisa PKI, pendukung Soekarno, serta kelompok lain yang menentang kepemimpinan Angkatan Darat, baik dari partai non-komunis maupun dari kalangan militer sendiri. Kedua, Soeharto mengadopsi prinsip Jawa "alon-alon asal kelakon" atau "biar lambat asal selamat" untuk menangani musuh-musuh militernya yang mungkin memiliki kekuatan untuk menggerakkan pasukan mereka (Crouch, 1999, p. 249).

Pandangan Harold Crouch terhadap Militer dan Politik pada Masa Orde Baru

Buku *Militer dan Politik di Indonesia* yang ditulis oleh Harold Crouch merupakan sebuah buku yang membahas bagaimana peran militer dalam politik Indonesia terutama pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana militer mempengaruhi pemerintahan dan struktur kekuasaan di Indonesia. Dalam salah satu bab bukunya, Crouch membahas bagaimana kepentingan ekonomi Angkatan Darat serta pengurangan peran partai-partai politik. Buku ini juga membahas pembunuhan massal dan penahanan tanpa proses hukum terhadap mereka yang dicurigai sebagai komunis (Matanasi, 2024). Soeharto dan pemerintah Orde Baru sangat sensitif terhadap kritik yang dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Buku-buku yang mengkritik militer, yang menjadi kekuatan utama pemerintahan Orde Baru, dipandang berisiko mengurangi dukungan publik dan mendorong gerakan oposisi. Pemerintah memberlakukan sensor ketat terhadap media dan buku-buku yang dianggap subversif atau mengancam stabilitas politik. Buku yang dapat membuka kesadaran kritis masyarakat mengenai peran

militer dalam pemerintahan Soeharto dianggap berbahaya bagi kelangsungan kekuasaan. Karya Harold Crouch termasuk salah satu buku yang dilarang pada masa itu. Menurut Crouch, "Orde Baru" bagaimanapun juga, tidaklah baru seperti yang diharapkan (Crouch, 1999, p. 16).

Berikut merupakan pandangan Crouch terhadap militer dan politik pada masa Orde Baru:

1. Dominasi Militer

Crouch memandang dominasi militer pada era Orde Baru sebagai hasil dari hubungan yang rumit antara kekuatan militer dan kepemimpinan politik, khususnya Soeharto. Sejak peristiwa '65, Soeharto mulai memimpin militer dan memiliki banyak pendukung di kalangan militer. Soeharto secara perlahan mulai menyingkirkan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan dirinya untuk mewujudkan konsolidasi politik. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut.

"Sesudah berhasil menguasai markas besar Angkatan Darat pada akhir tahun 1965, ia memusatkan perhatian melawan musuh-musuh potensialnya di antara para panglima daerah militer selama tahun 1966 dan dalam pada itu berhasil menyenangkan Nasution dengan mendudukannya di suatu kedudukan sipil terkemuka, walaupun secara relatif tak berdaya. Beberapa perwira selebihnya yang memegang jabatan-jabatan senior di bawah Yani segera diganti; sedikit demi sedikit proses konsolidasi diselesaikan beberapa tahun berikutnya dengan "kaum militan Orde Baru" yang menginginkan perubahan yang jauh dari yang diinginkan oleh Soeharto dan kawan-kawannya." (Crouch, 1999, p. 255)

Pada kutipan di atas menggambarkan bagaimana Soeharto menempatkan lawannya yang kuat di posisi yang menguntungkan tetapi tetap aman sehingga di masa yang akan datang tidak menjadi ancaman bagi dirinya. Sedangkan pejabat-pejabat lain yang tidak mendukungnya diganti dengan orang-orang yang mendukungnya demi mewujudkan konsolidasi politik. Hubungan antara Soeharto dengan kekuatan militer semakin langgeng saat Soeharto memegang komando atas keempat angkatan bersenjata sebagaimana dijelaskan dalam kutipan berikut. *"Pada tahun 1969 integrasi angkatan bersenjata yang telah lama dijanjikan terwujud, berupa pengalihan keseluruhan komando operasional keempat angkatan kepada Soeharto sebagai panglima angkatan bersenjata"* (Crouch, 1999, p. 256). Soeharto dalam menjalankan pemerintahannya kemudian menerapkan kebijakan yang disebut Dwifungsi ABRI. Dalam bukunya, Crouch menjelaskan bagaimana konsep Dwifungsi ABRI memberikan legitimasi bagi militer untuk berperan di dua ranah sekaligus, yaitu keamanan dan politik. Hal ini membuat militer menjadi aktor penting dalam semua level pemerintahan, dari pusat hingga daerah.

Crouch melihat bagaimana militer menggunakan kekuatan mereka untuk memperkuat status politik mereka dan melindungi kepentingan rezim. Angkatan Darat melakukan upaya-upaya untuk menekan partai-partai yang Soekarno dan partai-partai yang berpotensi mendukung Soekarno. Soeharto tidak ingin membubarkan partai-partai tersebut, tetapi hanya ingin menekannya agar tunduk pada pemerintahannya. Upaya-upaya ini berhasil menundukkan partai-partai di beberapa wilayah. Namun terdapat beberapa wilayah yang justru partainya lenyap atau membubarkan diri. Berikut kutipan yang memuat nama partai dan wilayah yang menjadi sasaran penekanan militer. *"Pada tahun 1967, sebagai bagian kampanye "pengordebaruan", panglima daerah Jawa Timur mengambil tindakan-tindakan keras terhadap PNI. Di bawah tekanan Jasin, pemimpin daerah partai, Sundoro Hardjoamidjojo segera mengganti mereka yang pro-Soekarno di antara pimpinan-pimpinan lokal partai maupun organisasi-organisasi massanya, serta memberhentikan untuk sementara para pemimpin Pemuda Marhaen dari keanggotaan partai. Bersamaan dengan itu Jasin melarang segala kegiatan umum partai dan organisasi-organisasi massanya, "membekukan" beberapa cabang*

setempat dan organisasi-organisasi mahasiswa, serta menahan mereka yang merintang apa yang dinamakan "kristalisasi". Walaupun ada tindakan semacam itu, Sundoro menerangkan bahwa "PNI tidak marah, bahkan sangat berterima kasih atas inisiatif panglima yang secara tulus membantu PNI melaksanakan pembersihan ke dalam. Pada awal tahun 1968 Jasin mengizinkan partai yang telah dibangun kembali itu untuk memulai lagi kegiatan-kegiatan kecuali di empat daerah, tetapi partai belum dapat berfungsi normal kembali sampai menjelang akhir tahun." (Crouch, 1999, p. 287).

Kutipan lainnya "*Tindakan-tindakan keras yang dilakukan Jasin di Jawa Timur masih dalam batas-batas yang ditentukan oleh Soeharto yang ingin mempertahankan PNI di bawah kepemimpinan mereka yang patuh. Akan tetapi tindakan yang dilakukan Brigadir Jenderal Ishak Djuarsa dan Brigadir Jenderal Sarwo Edhie di Sumatra lebih jauh dari itu. Di provinsi Aceh yang Islamnya sangat kuat, Panglima Daerah Militer Ishak Djuarsa mendorong organisasi-organisasi Islam melakukan tekanan yang kuat terhadap cabang PNI yang kecil sehingga partai itu merasa terpaksa membubarkan diri "secara sukarela" pada bulan April 1967. Ketika Ishak Djuarsa dipindahkan ke komando di Sumatra Selatan beberapa waktu kemudian, tekanan serupa dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam terhadap PNI di situ dengan akibat bahwa partai membubarkan diri pada bulan September 1967 di daerah tersebut. Di Sumatra Utara di mana PNI relatif kuat, panglima yang baru diangkat Sarwo Edhie "membekukan" partai pada bulan September sebagai bagian dari kampanye untuk menenyapkan unsur-unsur Soekarno di provinsi tersebut.*" (Crouch, 1999, p. 288).

Meskipun setelah 1966 Angkatan Darat mendominasi pemerintahan Indonesia, pemerintah tetap melibatkan berbagai kalangan sipil. Pemerintah membutuhkan keterampilan dan pengetahuan dari para profesional sipil untuk menjalankan pemerintahan dengan efektif, terutama dalam bidang-bidang yang mungkin tidak dikuasai oleh militer, seperti ekonomi, pendidikan, dan urusan internasional. Selain alasan praktis, melibatkan sipil juga bertujuan membentuk citra bahwa pemerintahan Indonesia tidak sepenuhnya didominasi oleh militer. Hal ini penting untuk menunjukkan kepada negara-negara Barat yang memberikan bantuan keuangan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang inklusif dan terorganisir, serta tidak bersifat otoriter sepenuhnya. Hal ini disebutkan dalam kutipan berikut. "*Walaupun Angkatan Darat sebenarnya mendominasi pemerintahan setelah 1966, namun di dalam pemerintahan diikutsertakan berbagai tipe orang sipil, dengan tujuan menarik keahlian dan pengalaman mereka dan untuk menciptakan gambaran yang baik terhadap negara-negara Barat yang memberikan bantuan keuangan*" (Crouch, 1999, p. 269).

Kendali Angkatan Darat atas pemerintahan di semua tingkat memungkinkan mereka mengatur arah keseluruhan administrasi. Meski posisi kekuasaan juga dipegang oleh kalangan sipil, mereka harus menyesuaikan diri dengan sistem yang dikuasai oleh militer. Dominasi ini tidak hanya memberi Angkatan Darat pengaruh besar atas kebijakan pemerintah di semua tingkatan, tetapi juga memungkinkan para perwira untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada rekan-rekan mereka di militer dan kalangan sipil. Pengangkatan dalam birokrasi bergantung pada persetujuan perwira militer, dan wewenang untuk memberikan izin, kontrak, serta keputusan proyek menjadi alat bagi Angkatan Darat untuk memberikan imbalan kepada mereka yang mendukung dominasi militer dan menghukum yang menolak. Selain itu, kekuasaan Angkatan Darat dalam mengangkat pejabat pemerintah memungkinkan mereka mengamankan posisi yang menguntungkan serta menyediakan peluang usaha bagi perwira yang tidak lagi memegang jabatan militer.

Crouch juga melihat bagaimana militer membatasi peran partai-partai politik dan kelompok sipil, menjaga agar kekuasaan tetap terpusat pada militer dan Soeharto. Pembatasan dilakukan melalui pengaturan ketat terhadap pemilu dan kontrol terhadap organisasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat

dalam kutipan berikut. “*Sementara Sarwo Edhie menekan PNI di Sumatra Utara, rekannya Dharsono dan Kemal Idris bergerak untuk memenangkan undang-undang pemilihan umum yang direncanakan untuk mengurangi peranan partai-partai politik secara drastis. Pada tahun 1968 mereka menganjurkan adanya perbaikan besar-besaran dalam sistem politik, termasuk pembubaran partai-partai yang ada dan pembentukan dua partai baru yang berbasis kesatuan-kesatuan aksi dan generasi muda. Tetapi mereka tidak dapat memenangkan dukungan luas dari rekan-rekan militer mereka terhadap pandangan-pandangan yang mereka ucapkan secara terbuka itu, sehingga ketika Dharsono mulai menjalankan gagasan dua partainya – yang telah diubah – tanpa persetujuan Soeharto dalam majelis-majelis lokal di Jawa Barat pada awal tahun 1969, Soeharto melarang*” (Crouch, 1999, pp. 263–264). Kutipan tersebut menjelaskan bahwa pada tahun itu sudah ada upaya-upaya untuk membatasi peran partai politik. Akan tetapi, upaya tersebut tidak mendapat dukungan dari rekan-rekan militer lainnya. Ketika Dharsono mencoba menerapkan gagasan partai baru tersebut, Soeharto segera melarangnya. Meskipun terjadi perpecahan dalam kalangan militer terkait peran partai politik, Soeharto tetap menjadi pengendali utama keputusan politik, dan tidak semua ide reformasi politik militer diterima atau diizinkan oleh Soeharto.

2. Militarisasi Sipil

Crouch membahas proses militarisasi sipil pada masa Orde Baru sebagai strategi Soeharto untuk memperkuat kekuasaannya. Menurut Crouch, Soeharto menggabungkan peran militer dan sipil guna membangun stabilitas politik yang kuat, namun dengan menempatkan militer sebagai kekuatan dominan di berbagai bidang. Banyak perwira militer yang diangkat ke posisi sipil dalam birokrasi negara, sehingga institusi-institusi sipil kehilangan otonominya. Crouch memandang ini sebagai upaya Soeharto untuk memastikan loyalitas terhadap pemerintahannya dan mengurangi risiko oposisi dari kalangan sipil. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. “*Penampilan kerja sama sipil-militer paling nyata terlihat dari komposisi kabinet, di mana anggota-anggota militer selalu merupakan minoritas dan makin berkurang dalam perombakan-perombakan kabinet berikutnya.*” Kutipan berikutnya, “*Walaupun orang-orang sipil merupakan mayoritas dalam kabinet, mereka tidak memiliki dukungan politik yang cukup untuk melaksanakan kekuasaan yang sebenarnya*” (Crouch, 1999, p. 269).

Meskipun partai politik masih memiliki perwakilan secara formal, kabinet di era Soeharto lebih bersifat teknokratis, dengan para anggota sipil yang bertindak lebih sebagai pegawai negeri daripada pemimpin politik. Sama seperti kabinet di bawah Soekarno, kabinet Soeharto bukanlah badan yang membuat keputusan, tetapi lebih berfungsi untuk mendengarkan arahan presiden dan melaporkan kepadanya. Para ahli ekonomi dalam kabinet memainkan peran penting dalam merancang kebijakan ekonomi, namun karena mereka tidak memiliki kekuatan politik yang signifikan, mereka harus menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kerangka yang ditetapkan oleh para jenderal. Crouch memaparkan bahwa militarisasi sipil tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat, tetapi juga di daerah. Perkembangan dominasi Angkatan Darat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun di berbagai provinsi di Indonesia. Sebaliknya orang-orang sipil menurun jumlahnya dalam pemerintahan daerah. Seperti dijelaskan dalam kutipan berikut ini, “*Posisi dominan perwira-perwira Angkatan Darat dalam pemerintahan pusat dibarengi dengan perkembangan serupa pada perwakilan Angkatan Darat dalam administrasi regional. Di awal tahun 1966, 12 di antara 24 gubernur provinsi adalah perwira-perwira Angkatan Darat, termasuk mereka yang berada di provinsi-provinsi penting seperti Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Pada tahun 1968 jumlah perwira Angkatan Darat naik menjadi 16, dan seorang perwira Angkatan Laut Letnan Jenderal Ali Sadikin dari KKO menjadi gubernur Jakarta.*”

Setelah pemilihan umum tahun 1971 jumlah gubernur-gubernur sipil turun menjadi empat di antara 26 gubernur.” Kutipan berikutnya, “Jumlah para perwira Angkatan Darat yang diangkat ke posisi-posisi administrasi regional juga naik di tingkat bupati-bupati dan walikota-walikota. Di Jawa Tengah dan Timur para perwira militer dengan cepat menggantikan PKI dan walikota-walikota yang ada hubungannya dengan PKI dan bupati-bupati di tahun 1965, kemudian dalam beberapa tahun sesudahnya banyak lagi orang-orang sipil diganti tidak hanya di daerah-daerah ini tetapi juga di seluruh Indonesia” (Crouch, 1999, p. 272).

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa selama periode 1966 hingga setelah pemilu 1971, Angkatan Darat secara bertahap memperkuat dominasinya dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jumlah perwira militer yang menduduki posisi sebagai gubernur, bupati, dan walikota meningkat secara signifikan, menggantikan banyak pejabat sipil. Perubahan ini terutama terlihat di daerah-daerah strategis seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, serta di daerah yang sebelumnya memiliki hubungan dengan PKI. Dominasi militer ini mencerminkan semakin kuatnya pengaruh Angkatan Darat dalam administrasi sipil di seluruh Indonesia pada masa Orde Baru.

3. Intervensi Politik

Dalam bukunya, Crouch membahas intervensi politik yang dilakukan militer selama masa Orde Baru sebagai bagian integral dari strategi Soeharto untuk mempertahankan kekuasaan. Crouch melihat bahwa intervensi ini terjadi di hampir semua aspek pemerintahan dan politik, dengan militer, terutama Angkatan Darat, memegang kendali atas proses politik, pembentukan kebijakan, dan pengaturan birokrasi. Soeharto menggunakan militer untuk menekan partai-partai politik dan mengontrol oposisi. Partai-partai politik dilemahkan melalui regulasi ketat, sementara militer menjadi kekuatan penentu dalam pengambilan keputusan politik. Langkah yang dilakukan Angkatan Darat untuk melemahkan partai-partai adalah dengan menyusun undang-undang yang memungkinkan pengurangan peranan partai. Angkatan darat mengusulkan agar kekuatan-kekuatan Pancasila yang harus menang dalam Pemilihan Umum. Seminar akhirnya menerima usulan tersebut untuk menjalankan sistem pemilihan yang diperkirakan akan tidak menguntungkan partai-partai politik. Adapun undang-undang yang dipersiapkan oleh Angkatan Darat untuk pemilu dapat dilihat dalam kutipan berikut. *“Setelah seminar Angkatan Darat tersebut, dipersiapkan dua undang-undang pemilihan dan satu undang-undang berkenaan dengan partai-partai politik, organisasi massa dan golongan-golongan fungsional untuk diajukan ke DPR pada awal tahun 1967. Undang-undang pemilihan umum tersebut menentukan bahwa tiap-tiap wakil mewakili kelompok pemilih dari satu kabupaten atau kota. Undang-undang yang kedua berkenaan dengan susunan MPR, DPR dan perwakilan-perwakilan regional, menetapkan bahwa hanya setengah dari anggota dari tiap lembaga tersebut yang boleh mewakili partai-partai politik, sedangkan yang separuh lagi mewakili golongan fungsional – di antaranya setengah diangkat sebagai wakil angkatan bersenjata mendapat seperempat dari seluruh kursi dalam tiap lembaga. Undang-undang ketiga menentukan syarat-syarat pengakuan partai-partai dan golongan-golongan fungsional serta organisasi-organisasi massa, yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah partai” (Crouch, 1999, p. 281).*

Akan tetapi, undang-undang ini menuai banyak kritik dan akhirnya ditinggalkan. Angkatan darat mengambil langkah lain yaitu dengan mempertimbangkan agar partai-partai politik diberikan kedudukan agar kemudian dapat mendukung rezim dan melawan para penentang. Hal ini dijelaskan dalam kutipan berikut. *“Berbaliknya kebijakan yang diambil oleh pimpinan Angkatan Darat tentang undang-undang pemilihan, menandai perubahan penting dalam penekanannya untuk mengadakan pendekatan terhadap partai-partai politik. Para pemimpin Angkatan Darat kini memperhitungkan*

bahwa bila partai-partai diberi kedudukan penting dalam parlemen dan mempunyai perwakilan dalam kabiner dan organ-organ pemerintahan yang lain, mereka akan cepat menyesuaikan diri dengan dominasi Angkatan Darat dan bersedia mendukung regim untuk melawan para penentang, seperti yang mereka lakukan pada waktu mendukung Soekarno di masa lalu”(Crouch, 1999, p. 282). Pemerintah mengubah pandangannya tentang undang-undang pemilihan dan cara mereka menangani partai-partai politik pada tahun 1967. Awalnya, pemerintah khawatir pemilihan yang dilakukan terlalu cepat akan membawa risiko. Namun, setelah menyadari bahwa risiko tersebut bisa dihindari, mereka mengubah fokus. Mereka tidak lagi terlalu menekankan perubahan sistem pemilihan atau mengurangi pengaruh pemimpin partai.

Strategi baru pemerintah mengakui bahwa partai-partai politik memainkan peran penting dalam melibatkan rakyat dalam sistem politik. Pemerintah sadar bahwa mereka bisa bekerja lebih mudah jika mendapat dukungan dari pemimpin-pemimpin partai, terutama yang ada di Jakarta. Harapannya, dengan melibatkan para pemimpin partai, para pendukung mereka di daerah akan merasa bahwa kepentingan mereka juga diperhatikan. Meskipun kelompok pendukung PKI (Partai Komunis Indonesia) tidak diberi tempat dalam sistem, pemerintah berusaha melibatkan pemimpin PNI (Partai Nasional Indonesia) dan NU (Nahdlatul Ulama). Mereka juga membentuk partai baru untuk mewakili mantan pendukung Masyumi, yang sudah dilarang. Namun, militer, terutama Angkatan Darat, ingin memastikan bahwa partai-partai politik tidak tumbuh terlalu kuat hingga bisa mengancam kekuasaan mereka. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan agar partai-partai politik dipimpin oleh orang-orang yang setia dan mau bekerja sama erat dengan pemerintah. Pemilu pada masa Orde Baru dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan militer dan rezim Soeharto. Militer memastikan bahwa pemilu tidak mengganggu stabilitas politik yang mereka ciptakan, dengan mengatur hasil pemilu agar tetap dalam kendali mereka. Partai Golkar dan Angkatan Darat dikerahkan untuk memastikan kemenangan Soeharto dan orang-orangnya dalam pemilu. Berbagai cara yang dilakukan untuk memenangkan pemilu dijelaskan dalam kutipan berikut, *“Ketika saat pemilihan umum makin mendekat para pegawai negeri ditekan untuk menandatangani “loyalitas tunggal” kepada pemerintah yang berarti memberi dukungan kepada Golkar, sementara para pejabat pemerintah lokal diberi “jatah” suara yang harus diperoleh bagi Golkar dalam daerahnya masing-masing, sehingga walaupun misalnya seorang pejabat lokal dalam hatinya masih memilih PNI atau partai lainnya, kepentingannya jelas mengatakan bahwa ia harus bekerja untuk kemenangan Golkar. Dengan cara menarik mereka yang pernah menjadi tulang punggung PNI, Golkar dapat menghancurkan sebagian besar dari pengaruh PNI dalam pemilihan umum”*(Crouch, 1999, pp. 299–300).

Pendekatan terhadap partai-partai Islam dilakukan dengan cara yang berbeda. Pada tahun 1970, ada upaya untuk menarik hati para kiai berpengaruh dengan membiayai perjalanan ke luar negeri dan memberikan dana untuk pesantren mereka. Pada Januari 1971, GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam) yang hampir mati dihidupkan kembali setelah lebih dari delapan ratus kiai diundang ke konferensi, yang memilih Mayor Jenderal Sudjono Humardani – seorang abangan – sebagai "pelindung" dan mendengarkan pidato presiden. Surat kabar Abadi yang pro-Parmusi mengkritik bahwa beberapa kiai tergoda oleh janji audiensi dengan presiden, sementara sekelompok kiai dari Jawa Barat yang pernah terlibat dalam skandal pemalsuan dijanjikan tidak akan dituntut. Sistem politik di masa Orde Baru sangat tersentralisasi, dengan partai politik dibatasi pada tiga partai: Golkar (yang didukung penuh oleh pemerintah), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Golkar, sebagai partai pemerintah, mendominasi semua aspek kehidupan politik, dan partai-partai lain hanya berfungsi sebagai pengimbang yang lemah. Pada masa ini terjadi

pembatasan otonomi daerah. Kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) diangkat oleh pemerintah pusat, sehingga loyalitas mereka lebih besar kepada pusat daripada kepada rakyat di daerah. Daerah tidak memiliki kewenangan yang signifikan untuk mengelola sumber daya alam atau membuat kebijakan lokal yang penting. Pemerintah pusat juga mengendalikan informasi dan media, sehingga opini publik dikendalikan untuk mendukung rezim Orde Baru. Setiap bentuk kritik atau perbedaan pendapat, baik dari individu maupun kelompok di daerah, ditindak tegas oleh pemerintah (Poesponegoro et al., 2010, p. 174).

Analisis Karya Harold Crouch

Harold Crouch menulis bukunya yang berjudul *Militer dan Politik di Indonesia* (judul asli: *The Army and Politics in Indonesia*) selama kurang lebih sepuluh tahun. Penelitian untuk buku ini dimulai pada akhir 1960-an hingga akhir 1970-an. Crouch sendiri adalah seorang ilmuwan politik yang melakukan kajian mendalam tentang peran militer dalam politik Indonesia, terutama setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan selama masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1978 dan merupakan hasil dari penelitian lapangan yang mendalam serta analisis komprehensif terhadap dinamika hubungan antara militer dan politik di Indonesia. Crouch membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan bukunya karena pendekatan yang teliti, termasuk pengumpulan data melalui sumber-sumber tertulis dan wawancara langsung dengan tokoh-tokoh politik dan militer (Matanasi, 2024).

Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah bahwa Crouch tidak hanya mengandalkan dokumen resmi, tetapi juga terjun langsung ke lapangan, melakukan wawancara dengan para aktor yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting. Ini membuat hasil penelitiannya lebih kaya dan akurat dalam menggambarkan peran militer sebagai aktor utama dalam politik Indonesia. Dalam menulis *Militer dan Politik di Indonesia*, Harold Crouch tidak hanya berpegang pada fakta-fakta politik dan militer semata, tetapi juga tak lepas dari pengaruh konteks sejarah dan budaya di masa itu. Crouch melakukan penelitian dan penulisan buku ini pada zaman Orde Baru di Indonesia sehingga secara alamiah tulisannya dipengaruhi oleh jiwa zaman (*zeitgeist*) dan kondisi sosial budaya pada masa itu.

1. Pengaruh *Zeitgeist*

Harold Crouch menulis karyanya dalam konteks yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dan domestik pada zamannya. Pada masa Orde Baru, dunia sedang berada dalam situasi Perang Dingin, di mana ideologi komunisme dan kapitalisme bersaing secara global. Indonesia, di bawah kepemimpinan Soeharto, mengambil sikap tegas anti-komunis, yang berpengaruh besar terhadap struktur politik dan militer di negara tersebut. Crouch melihat bahwa Orde Baru didirikan di atas fondasi antikomunisme yang kuat, yang menjadi alasan utama militer mengambil peran dominan dalam politik. Militer tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pilar utama pemerintahan Soeharto. Dalam pandangan Crouch, jiwa zaman ini sangat mempengaruhi kebijakan dan strategi yang diambil oleh militer dan pemerintah Indonesia. Ketakutan terhadap ancaman komunisme menjadi justifikasi untuk berbagai tindakan represif yang dilakukan oleh militer. Pengaruh *zeitgeist* atau semangat zaman dapat memengaruhi penggambaran militer dan politik pada masa Orde Baru yang tercermin dalam karya Harold Crouch. *Zeitgeist* mencerminkan suasana atau semangat umum dari suatu periode waktu tertentu, termasuk nilai-nilai, keyakinan, dan pandangan yang mendominasi masyarakat pada saat itu. Dalam konteks penulisan buku "*The Army and Politics in Indonesia*" pada masa Orde Baru, ada beberapa faktor *zeitgeist* yang mungkin mempengaruhi pandangan dan analisis Harold Crouch, konteks Politik dan Sosial, Kebijakan Pemerintah, Kontak dengan Informan Lokal. Sebagai seorang akademisi yang melakukan penelitian lapangan, Harold

Crouch mungkin berinteraksi dengan berbagai informan lokal, termasuk akademisi, aktivis, dan pejabat pemerintah, dalam menyusun bukunya. Pandangan dan pengalaman informan ini dapat memengaruhi pemahaman dan penilaian Crouch terhadap peran militer dan politik pada masa Orde Baru (K.J, 1998, pp. 27–48)

Crouch juga mencatat bahwa rezim Orde Baru menggunakan pembangunan ekonomi sebagai alat legitimasi. Pada masa itu, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dianggap sebagai indikator keberhasilan pemerintahan. Militer memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan ekonomi ini. Dalam konteks ini, Crouch menilai bahwa jiwa zaman Orde Baru sangat dipengaruhi oleh kebutuhan akan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang keduanya bergantung pada peran militer yang kuat. Meskipun pengaruh *zeitgeist* dapat memainkan peran dalam penulisan dan penelitian akademis, Harold Crouch dikenal sebagai seorang akademisi yang obyektif dan kritis. Meskipun mungkin ada faktor-faktor eksternal yang memengaruhi konteks di mana bukunya ditulis, karyanya tetap didasarkan pada penelitian yang cermat dan analisis yang mendalam, dengan tujuan memberikan pemahaman yang akurat tentang politik Indonesia pada masa Orde Baru (Crouch, 1999, pp. 309–310).

2. Pengaruh Sosial Budaya

Karya Harold Crouch dalam buku "The Army and Politics in Indonesia" dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya pada masa Orde Baru di Indonesia. Periode Orde Baru ditandai oleh kontrol politik yang ketat, pembatasan kebebasan berpendapat, dan dominasi militer dalam kehidupan politik dan masyarakat. Beberapa cara di mana sosial dan budaya pada masa itu mempengaruhi karya Crouch adalah Pembatasan Informasi, Konteks Politik yang Tidak Stabil, Kontak dengan Informan Lokal, Ketegangan Politik dan Konflik Sosial. Selama masa Orde Baru, Indonesia mengalami berbagai ketegangan politik dan konflik sosial, termasuk konflik etnis, agama, dan kepentingan politik. Dinamika konflik ini mungkin menjadi latar belakang bagi penelitian Crouch tentang peran militer dalam menjaga stabilitas politik dan mengatasi konflik internal. Dengan demikian, karya Harold Crouch dalam buku "The Army and Politics in Indonesia" terpengaruh oleh konteks sosial dan budaya yang ada pada masa Orde Baru. Namun, Crouch tetap berusaha untuk menyajikan analisis yang obyektif dan berdasarkan fakta, meskipun harus beroperasi dalam lingkungan politik yang otoriter dan terbatas (J.A, 2008).

Militer Dan Politik Di Indonesia (terjemahan), karangan Harold Crouch membahas peran politik militer dari demokrasi terpimpin hingga awal orde baru. Pada bagian akhir, Crouch lebih memberikan penekanan pada kegiatan bisnis perwira-perwira tinggi Angkatan Darat yang mendapatkan keistimewaan dari Soeharto. Crouch menggambarkan secara rinci kontrol militer terhadap berbagai aspek kehidupan politik dan pemerintahan, mulai dari pembuatan kebijakan hingga pengawasan terhadap media dan masyarakat sipil. Melalui analisis yang cermat, ia menyoroti bagaimana militer di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto memanfaatkan kekuasaannya untuk mempertahankan stabilitas politik dan mengamankan kepentingan rezim. Buku ini juga menggambarkan dinamika hubungan yang kompleks antara militer dan pemerintahan sipil, dengan menunjukkan bagaimana militer tidak hanya menjadi kekuatan politik yang dominan, tetapi juga memainkan peran dalam pembentukan kabinet dan kebijakan pemerintah. Selain itu, Harold Crouch juga menggambarkan perubahan politik yang terjadi selama masa Orde Baru, termasuk transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto dan konsekuensi politik yang menyertainya (J.A, 2008).

Buku ini tidak hanya memberikan wawasan yang mendalam tentang peran militer dalam politik Indonesia, tetapi juga menggambarkan dampaknya terhadap perkembangan politik dan sosial di

negara tersebut. Dengan gaya penulisan yang jelas dan analisis yang berimbang, Crouch berhasil menghadirkan karya yang menjadi referensi penting bagi siapa pun yang tertarik memahami dinamika politik Indonesia pada masa Orde Baru. Crouch melihat bahwa melalui sosial budaya, militer mampu mengintegrasikan dirinya ke dalam struktur masyarakat Indonesia, membuatnya tidak hanya sebagai kekuatan politik tetapi juga sebagai elemen integral dari identitas nasional. Ini membuat militer memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat, yang sering kali mendukung tindakan-tindakan militer yang represif dengan alasan menjaga stabilitas dan keutuhan negara. Buku ini juga menyoroti tantangan dan kontroversi yang muncul seiring dominasi militer, termasuk penindasan terhadap oposisi politik, pembatasan kebebasan sipil, dan korupsi yang meluas di kalangan anggota militer. Dengan menggali sumber-sumber yang kaya dan melalui pendekatan analitis yang mendalam, Crouch secara jelas mengilustrasikan bagaimana kontrol militer telah membentuk dan mempengaruhi arah politik dan sosial Indonesia selama periode Orde Baru. Keseluruhan, buku ini tidak hanya memberikan gambaran yang komprehensif tentang masa itu, tetapi juga menantang pembaca untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari dominasi militer terhadap perkembangan demokrasi dan tatanan politik Indonesia.

KESIMPULAN

Harold Crouch dalam bukunya "Militer dan Politik di Indonesia" menyoroti dominasi militer dalam politik Orde Baru. Militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga mendominasi pengambilan keputusan politik di berbagai bidang. Kekuatan militer ini membentuk sistem yang terpusat dan otoriter. Pandangan Crouch ini dipengaruhi oleh konteks zamannya. Perang Dingin dan kondisi dalam negeri Indonesia yang otoriter membentuk cara Crouch menganalisis peran militer. Ia melihat militer sebagai kekuatan sentral yang membentuk struktur sosial dan politik Indonesia pada masa itu. Karya Crouch mengajarkan kita bahwa sejarah tidak selalu objektif. Cara kita memahami sejarah dipengaruhi oleh pandangan politik dan budaya pada saat penulisan. Buku Crouch menjadi contoh bagaimana sejarah dapat ditafsirkan secara berbeda tergantung pada konteksnya. Intinya, buku Crouch memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran militer dalam politik Orde Baru dan mengajarkan kita untuk melihat sejarah secara kritis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. LKis Pelangi Aksara.
- Anwar. (2018). Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Adabiya*, 20(1).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/adabiya.v20i1.6776>
- Crouch, H. (1999). *Militer dan Politik di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Emmerson, D. K. (2001). *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat Transisi*. Gramedia.

- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah*. UI Press.
- J.A, M. (2008). *Indonesia: From Soeharto to the Reformation*. Pustaka Sinar Harapan.
- K.J, H. (1998). The Indonesian Military and the Anti-Communist Campaign: 1965-1966. *Journal of Southeast Asian Studies*, 29(1), 27–48.
- Matanasi, P. (2024). Rezim Orde Baru Soeharto melarang beredarnya terjemahan buku seorang peneliti militer bernama Harold Crouch alias Haris Amir. *Tirto.Id*.
- Nordholt, H. S. (2008). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Poesponegoro, Djoened, M., & Notosusanto, N. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Balai Pustaka.
- Ricklefs. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Serambi Ilmu Semesta.
- Ysh, S. (2016). *Prosedur dan Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Magnum Pustaka Utama.
- Yusa' Farchan. (2022). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 152–161. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41>
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.